

PENGARUH PROFESIONALISME AUDITOR TERHADAP PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI SURABAYA

Sofian

KAP Paul, Hadiwinata, Arsono, Ade Fatma & Rekan

Lindrawati

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

sofianjibang@yahoo.com

Abstract

Financial reports as a medium of communication required by the parties outside the company to base decision-making. So that financial statements can be a tool that is reliable and relevant for making a decision, financial statements need to be audited by an independent third party, in this case the external auditor. One of the auditor's responsibilities is to determine the materiality level consideration of client's financial statements, which is influenced by professionalism auditors. Therefore, this study aims to examine the influence of the professionalism auditors on materiality consideration. The research design was quantitative with the hypothesis. Data obtained directly from distributing questionnaires to the public accountant who worked in the office of the public accountant in Surabaya. Data analysis technique was using multiple linear regression models, testing the validity and reliability, test assumptions classical, and hypothesis testing by t test. The analysis showed that the professionalism of auditors affect the level of materiality considerations. From the five dimensions of auditor professionalism, dedication to the profession and social obligations affect the level of materiality, where dedication to the profession and social obligations have a positive influence, while not affecting auditor's consideration of materiality are autonomy, belief in self-regulation, and professional community affiliation.

Keywords: *external auditor, auditor's consideration of materiality, professionalism auditors.*

Pendahuluan

Audit adalah jasa profesi yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan dilaksanakan oleh seorang auditor, yang sifatnya sebagai jasa pelayanan. Setiap perusahaan berbadan hukum berbentuk perseroan terbatas terutama perusahaan yang telah *go public*, memerlukan jasa audit atas laporan keuangan. Menurut Boynton, Johnson, dan Kell (2002:6), audit laporan keuangan berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip akuntansi berlaku umum. Laporan keuangan menjadi media komunikasi yang diperlukan pihak-pihak di luar perusahaan yang berkepentingan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan. Masyarakat dan pemakai laporan keuangan mengharapkan agar auditor dapat memberikan jaminan

mutlak mengenai hasil akhir proses audit, yaitu laporan auditor yang berupa opini audit.

Pihak-pihak luar perusahaan memerlukan informasi mengenai perusahaan untuk pengambilan keputusan investasi. Umumnya mereka mendapatkan informasi dari laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Di satu pihak, manajemen ingin menyampaikan informasi mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana yang berasal dari pihak luar, di pihak lain, pihak luar perusahaan ingin memperoleh informasi yang handal dari manajemen mengenai pertanggungjawaban dana yang mereka investasikan. Adanya dua kepentingan ini mengakibatkan timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik atau auditor eksternal.

Laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perlu diaudit oleh pihak ketiga yang independen, yaitu auditor eksternal karena: (1) adanya perbedaan kepentingan antara manajemen perusahaan dengan pihak luar perusahaan, (2) laporan keuangan ada kemungkinan mengandung salah saji baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dan (3) perusahaan memerlukan opini wajar tanpa pengecualian dari auditor eksternal. Diharapkan para pemakai laporan keuangan dapat memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material dan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum setelah diaudit oleh auditor eksternal.

Sebagai profesi yang dibutuhkan masyarakat, auditor eksternal harus berpegang teguh pada Kode Etik Profesi Akuntan Publik, dimana di dalamnya ada tuntutan bagi auditor eksternal untuk berperilaku profesional. Profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Profesionalisme menjadi syarat utama bagi orang yang bekerja sebagai auditor eksternal. Setiap praktisi wajib mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi (Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), 2010). Auditor eksternal yang memiliki pandangan profesionalisme akan memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan. Para pemakai laporan keuangan menaruh kepercayaan besar terhadap hasil pekerjaan akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan. Kepercayaan inilah yang akhirnya mengharuskan auditor memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Untuk dapat mencapai mutu dan kualitas yang baik tentunya hal yang dipertimbangkan salah satunya adalah tingkat materialitas (Martiyani, 2010). Profesionalisme itu sendiri dapat dilihat melalui lima dimensi, yaitu pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap peraturan profesi, dan hubungan dengan sesama profesi (Syahrir, 2002; dalam Fridati, 2005).

Pada saat audit laporan keuangan, auditor terlebih dahulu membuat perencanaan audit. Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2008:319), salah satu perencanaan yang dilakukan auditor yaitu menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko inheren. Dalam perencanaan tersebut, auditor dihadapkan dengan keputusan atas pertimbangan tingkat materialitas. Risiko Audit dan Materialitas dalam Pelaksanaan Audit No.10 (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2001) mendefinisikan materialitas sebagai besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut. Definisi tersebut mengakui pertimbangan materialitas dilakukan dengan memperhitungkan keadaan yang melingkupi dan perlu melibatkan baik pertimbangan kuantitatif maupun kualitatif. Sedangkan, materialitas laporan keuangan merupakan salah saji agregat

minimum dalam laporan keuangan untuk mencegah laporan disajikan secara wajar sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (Boynton dkk., 2002:331).

Risiko Audit dan Materialitas dalam Pelaksanaan Audit No.12 (IAI, 2001) menyatakan agar auditor mempertimbangkan materialitas dalam: (1) merencanakan audit dan merancang prosedur audit, serta (2) Mengevaluasi apakah laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Auditor perlu mempertimbangkan materialitas dan risiko audit dalam perencanaan sifat, luas, dan saat prosedur audit, serta pengevaluasian hasil prosedur (Simamora, 2002:97). Pertimbangan auditor tentang materialitas adalah masalah kebijakan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan yang beralasan dari laporan keuangan (IAI, 2001). Sebagai auditor profesional, dalam melaksanakan proses audit dan penyusunan laporan keuangan, wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara profesional maka auditor harus membuat perencanaan audit sebelum memulai proses audit. Dalam memenuhi perannya yang membutuhkan tanggung jawab besar, auditor eksternal harus memiliki wawasan luas dan pengalaman memadai (Fridati, 2005; Wahyudi dan Mardiyah, 2006; Herawaty dan Susanto, 2008).

Pertimbangan atas materialitas bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan karena standar audit tidak mengatur secara rinci tentang nilai materialitas yang harus ditentukan oleh auditor. Oleh karena itu, baik tidaknya pertimbangan auditor tentang materialitas ditentukan oleh kualitas auditor itu sendiri atau dalam hal ini adalah profesionalisme auditor. Semakin baik profesionalisme seorang auditor, maka semakin baik pula pertimbangannya atas materialitas (Herawaty dan Susanto, 2008). Sikap profesionalisme yang baik membuat seseorang akan mampu melaksanakan tugasnya, meskipun imbalan ekstrinsiknya berkurang. Selain itu, profesionalisme seorang auditor akan mampu untuk membuat keputusan tanpa tekanan pihak lain. Auditor akan selalu bertukar pikiran dengan rekan sesama profesi, dan selalu beranggapan bahwa yang paling berwenang untuk menilai pekerjaannya adalah rekan sesama profesi sehingga dengan profesionalisme yang tinggi kemampuan dalam mempertimbangkan tingkat materialitas suatu laporan keuangan akan semakin baik pula (Pramono, 2007).

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah: "Apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas pada KAP di Surabaya?". Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas pada KAP di Surabaya.

Rerangka Teori dan Hipotesis

Auditing

Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen (Arens dkk., 2008:4). Dari definisi tersebut terdapat beberapa kata dan frase kunci, yaitu:

1. Informasi dan Kriteria yang telah ditetapkan, berarti informasi harus tersedia dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan beberapa standar (kriteria) yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut. Kriteria yang berlaku biasanya adalah Prinsip-prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU).

2. Mengumpulkan dan Mengevaluasi Bukti, dalam hal ini bukti adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk memenuhi tujuan audit, auditor harus memperoleh bukti dengan kualitas dan jumlah yang mencukupi.
3. Orang yang kompeten dan Independen, merupakan auditor yang memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti tersebut. Auditor juga harus memiliki sikap mental independen yang tinggi untuk menjaga kepercayaan para pemakai yang mengandalkan laporan mereka.

Menurut Boynton dkk. (2002:5), auditing didefinisikan sebagai:

“suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Jenis-jenis audit yang dilakukan akuntan publik meliputi (Arens dkk., 2008:17):

1. Audit Operasional, mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi.
2. Audit Ketaatan, untuk menentukan apakah laporan yang diaudit telah mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil audit ketaatan dilaporkan ke manajemen, bukan ke pemakai luar. Oleh karena itu, pekerjaan jenis ini dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi tersebut.
3. Audit Laporan Keuangan, dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu, dalam hal ini PABU. Dalam menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan PABU, auditor mengumpulkan bukti untuk menetapkan apakah laporan keuangan itu mengandung kesalahan yang material atau salah saji lainnya.

Jenis-jenis auditor menurut Arens dkk. (2008:19) yang umum adalah:

1. Akuntan Publik, bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi nonkomersial yang lebih kecil.
2. Auditor Badan Akuntabilitas Pemerintah, merupakan auditor yang bekerja untuk pemerintah yang mempunyai fungsi audit bagi pemerintah, dan memikul tanggung jawab audit yang sama seperti sebuah KAP. Jenis auditor ini di Indonesia dikenal sebagai Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Agen Penerimaan Negara, merupakan badan yang bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak pemerintah. Salah satu tanggung jawabnya adalah mengaudit SPT pajak wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Auditor jenis ini di Indonesia dikenal sebagai Direktorat Jendral Pajak.

4. Auditor Internal, dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen.

Risiko Audit dan Materialitas dalam Pelaksanaan Audit No.8 (IAI, 2001) menyatakan tanggung jawab auditor untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Auditor tidak bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh keyakinan bahwa salah saji terdeteksi, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan, yang tidak material terhadap laporan keuangan. Auditor independen juga bertanggung jawab terhadap profesinya, tanggung jawab untuk mematuhi standar yang diterima oleh para praktisi rekan seprofesinya.

Profesionalisme Auditor

Profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Profesionalisme dapat dibedakan secara konseptual, profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme merupakan atribut individual yang penting tanpa melihat apakah suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak (Lekatompessy, 2003; dalam Herawaty dan Susanto, 2008).

Konsep profesionalisme modern dalam melakukan suatu pekerjaan seperti dikemukakan oleh Lekatompessy (2003, dalam Herawaty dan Susanto, 2008), berkaitan dengan dua aspek penting, yaitu aspek struktural dan aspek sikap. Aspek struktural karakteristiknya merupakan bagian dari pembentukan tempat pelatihan, pembentukan asosiasi profesional dan pembentukan kode etik. Sedangkan aspek sikap berkaitan dengan pembentukan jiwa profesionalisme. Sikap profesional tercermin pada pelaksanaan kualitas yang merupakan karakteristik atau tanda suatu profesi atau seorang profesional. Seorang akuntan publik yang profesional harus memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat, klien termasuk mematuhi standar yang diterima oleh para praktisi rekan seprofesinya.

Salah satu hal yang membedakan profesi akuntan publik dengan profesi lainnya adalah tanggung jawab profesi akuntan publik dalam melindungi kepentingan publik. Oleh karena itu, tanggung jawab profesi akuntan publik tidak hanya terbatas pada kepentingan klien atau pemberi kerja. Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik (IAPI, 2010), setiap Akuntan Publik wajib mematuhi prinsip dasar etika profesi di bawah ini:

1. Prinsip Integritas, yaitu praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya.
2. Prinsip Objektivitas, yaitu praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain memengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya.
3. Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, yaitu setiap praktisi wajib memelihara pengetahuan dan keahlian profesionalnya pada suatu tingkatan yang dipersyaratkan secara berkesinambungan, sehingga klien atau pemberi kerja dapat menerima jasa profesional yang diberikan

secara kompeten berdasarkan perkembangan terkini dalam praktik, perundang-undangan, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Praktisi harus bertindak secara profesional dan sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya.

4. Prinsip Kerahasiaan, yaitu praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan hubungan bisnisnya, serta tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari klien atau pemberi kerja, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku. Informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis tidak boleh digunakan oleh praktisi untuk keuntungan pribadinya atau pihak ketiga.
5. Prinsip perilaku profesional, yaitu praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

Prinsip perilaku profesional mewajibkan praktisi untuk mematuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Hal ini mencakup setiap tindakan yang dapat mengakibatkan terciptanya kesimpulan yang negatif oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, yang dapat menurunkan reputasi profesi. Dalam memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaannya, praktisi tidak boleh merendahkan martabat profesi. Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik (IAPI, 2010), praktisi harus bersikap jujur dan tidak boleh bersikap atau melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh; atau
2. Membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan praktisi lain.

Dimensi Profesionalisme

Sikap profesional tercermin pada pelaksanaan kualitas yang merupakan karakteristik atau tanda suatu profesi atau seorang profesional. Sikap dan tindakan profesional merupakan tuntutan di berbagai bidang profesi, termasuk auditor. Auditor yang profesional dalam melakukan pemeriksaan diharapkan akan menghasilkan audit yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh organisasi. Profesional yang harus ditanamkan kepada auditor dalam menjalankan fungsinya yang antara lain dapat melalui pendidikan dan latihan penjenjangan, seminar, serta pelatihan yang bersifat berkelanjutan.

Dalam penelitian ini konsep profesionalisme yang digunakan adalah konsep untuk mengukur bagaimana para profesional memandang profesi mereka yang tercermin dalam sikap dan perilaku mereka. Syahrir (2002, dalam Fridati, 2005) mengembangkan konsep profesionalisme dari level individual yang digunakan untuk profesionalisme eksternal auditor, meliputi lima dimensi, yaitu:

1. Pengabdian pada profesi (*dedication*), yaitu sikap yang tercermin dalam dedikasi profesional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang

- dimiliki, serta keteguhan untuk tetap melaksanakan profesinya meskipun imbalan ekstrinsiknya berkurang. Sikap ini adalah ekspresi dari penyerahan diri secara total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan hidup dan bukan sekadar sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penyerahan diri secara total merupakan komitmen pribadi, dan sebagai kompensasi utama yang diharapkan adalah kepuasan rohaniyah dan kemudian kepuasan material.
2. Kewajiban sosial (*social obligation*), yaitu pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat ataupun oleh profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Sikap profesionalisme dalam pekerjaan tidak terlepas dari kelompok orang yang menciptakan sistem suatu organisasi tersebut. Hal ini berarti bahwa atribut personal diciptakan sehingga layak diperlakukan sebagai suatu profesi.
 3. Kemandirian (*autonomy demands*), yaitu suatu pandangan bahwa seorang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak yang lain. Adanya intervensi yang datang dari luar dianggap sebagai hambatan yang dapat mengganggu otonomi profesional. Banyak orang menginginkan pekerjaan yang memberikan hak bagi mereka, dan hak istimewa untuk membuat keputusan-keputusan dan bekerja tanpa diawasi secara ketat. Rasa kemandirian akan timbul melalui kebebasan yang diperoleh. Dalam pekerjaan yang terstruktur dan dikendalikan oleh manajemen secara ketat, akan sulit menciptakan tugas yang menimbulkan rasa kemandirian dalam tugas.
 4. Keyakinan terhadap peraturan profesi (*belief in self-regulation*), yaitu suatu keyakinan bahwa yang berwenang untuk menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, dan bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.
 5. Hubungan dengan sesama profesi (*professional community affiliation*), berarti menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesinya.

Auditor harus selalu meningkatkan profesionalisme sehingga mereka *accountable* baik terhadap orang lain maupun diri sendiri. Oleh karena itu pendidikan profesionalisme berkelanjutan mutlak diperlukan baik menyangkut komputerisasi data, kompleksitas transaksi, pendekatan terbaru di bidang audit maupun perubahan dari bidang keuangan yang menyangkut pengukuran nilai mata uang.

Materialitas

Risiko Audit dan Materialitas dalam Pelaksanaan Audit No.10 (IAI, 2001) mendefinisikan materialitas sebagai berikut:

“Materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut.”

Definisi tersebut mengakui pertimbangan materialitas dilakukan dengan memperhitungkan keadaan yang melingkupi dan perlu melibatkan baik pertimbangan kuantitatif maupun kualitatif.

Konsep materialitas mengakui bahwa beberapa hal dalam laporan keuangan, baik secara individual atau keseluruhan penting bagi kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Konsep materialitas berkaitan dengan seberapa besar salah saji yang terdapat dalam asersi dapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh besarnya salah saji tersebut. Frasa "menyajikan secara wajar", dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, menunjukkan keyakinan auditor bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak mengandung salah saji material.

Dalam merencanakan suatu audit, auditor harus menilai materialitas pada dua tingkat, yaitu (Boynton dkk., 2002:331):

1. Tingkat laporan keuangan, karena pendapat auditor mengenai kewajaran meluas sampai laporan keuangan secara keseluruhan.
2. Tingkat saldo akun, karena auditor menguji saldo akun dalam memperoleh kesimpulan keseluruhan atas kewajaran laporan keuangan.

Materialitas saldo akun adalah salah saji minimum yang dapat muncul dalam suatu saldo akun hingga dianggap mengandung salah saji material. Salah saji hingga tingkat tersebut dikenal sebagai salah saji yang dapat ditolerir (Boynton dkk., 2002:334). Dalam membuat pertimbangan mengenai materialitas pada tingkat saldo akun, auditor harus mempertimbangkan hubungan antara materialitas pada tingkat saldo akun dan materialitas pada tingkat laporan keuangan. Pertimbangan ini harus mengarahkan auditor untuk merencanakan audit guna mendeteksi salah saji yang mungkin tidak material secara individual, tetapi apabila diagregasi dengan salah saji pada saldo akun lainnya, mungkin akan material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

Materialitas laporan keuangan adalah salah saji agregat minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting untuk mencegah laporan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum. Laporan keuangan mengandung salah saji material apabila laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang dampaknya, secara individual atau keseluruhan, cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Salah saji dapat terjadi sebagai akibat dari kekeliruan atau kecurangan. Oleh karena itu, setelah para auditor mengumpulkan bukti audit, mereka harus segera menilai signifikansi temuan audit. Apabila digunakan teknik penarikan sampel, auditor harus memproyeksikan salah saji yang diketahuinya dalam sampel pada populasi secara keseluruhan. Salah saji yang diproyeksikan ini kemudian harus dievaluasi untuk menentukan apakah menurut pertimbangan auditor hal tersebut akan mempengaruhi pengguna laporan keuangan yang berkepentingan.

Hipotesis

Profesionalisme menjadi syarat utama bagi orang yang bekerja sebagai auditor eksternal. Setiap praktisi wajib mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi (IAPI, 2010). Profesionalisme sendiri adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Untuk dapat mencapai mutu dan kualitas yang baik tentunya hal yang dipertimbangkan dalam proses audit laporan keuangan salah satunya adalah tingkat materialitas (Martiyani, 2010).

Pada saat audit laporan keuangan, auditor terlebih dahulu membuat perencanaan audit secara memadai. Salah satu perencanaan yang dilakukan auditor, yaitu menetapkan materialitas dan menilai risiko audit yang dapat diterima serta risiko inheren (Arens dkk., 2008:319). Materialitas didefinisikan sebagai besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut (IAI, 2001). Definisi tersebut mengakui pertimbangan materialitas dilakukan dengan memperhitungkan keadaan yang melingkupi dan perlu melibatkan baik pertimbangan kuantitatif maupun kualitatif. Auditor perlu mempertimbangkan materialitas dan risiko audit dalam perencanaan sifat, luas, dan saat prosedur audit, serta dalam pengevaluasian hasil prosedur tersebut (Simamora, 2002:97).

Pertimbangan auditor tentang materialitas adalah masalah kebijakan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan yang beralasan dari laporan keuangan (IAI, 2001). Pertimbangan atas materialitas bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan karena standar audit tidak mengatur secara rinci tentang nilai materialitas yang harus ditentukan oleh auditor. Oleh karena itu, baik tidaknya pertimbangan auditor tentang materialitas ditentukan oleh kualitas auditor sendiri yaitu profesionalisme auditor yang terdiri atas pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap peraturan profesi, dan hubungan dengan sesama profesi. Dengan demikian maka profesionalisme dapat dilihat dari lima dimensi tersebut.

Pengabdian pada profesi (*dedication*) yaitu sikap yang tercermin dalam dedikasi profesional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki, serta keteguhan untuk tetap melaksanakan profesinya meskipun imbalan ekstrinsiknya berkurang (Fridati, 2005; Wahyudi dan Mardiyah, 2006; Pramono, 2007; Yendrawati, 2008). Pengabdian terhadap profesi yang tinggi dapat dilihat dari penggunaan pengetahuan, kemampuan dan pengalaman auditor dalam melaksanakan keseluruhan proses audit, keinginan untuk tetap tinggal dan bekerja sebagai auditor apapun yang terjadi dan kepuasan batin yang didapat karena berprofesi sebagai auditor dan memiliki cita-cita sebagai auditor sejak dulu (Fridati, 2005). Selain itu, penyerahan diri secara total merupakan komitmen pribadi, dan sebagai kompensasi utama yang diharapkan adalah kepuasan rohaniyah dan kemudian kepuasan material. Komitmen kuat terhadap profesi membuat auditor semakin profesional dan semakin objektif dalam mengambil

suatu keputusan (Pramono, 2007). Dengan demikian auditor menggunakan pengetahuan, kemampuan dan pengalamannya untuk menentukan batas nilai materialitas yang akurat. Sedangkan komitmen yang dimiliki auditor dalam pekerjaannya membantu auditor lebih fokus dan objektif dalam proses penentuan tingkat materialitas. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disusun hipotesis berikut:

H1: Pengabdian pada profesi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Kewajiban sosial (*social obligation*), yaitu pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh masyarakat ataupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut (Fridati, 2005; Wahyudi dan Mardiyah, 2006; Pramono, 2007; Yendrawati, 2008). Kesadaran auditor demi kelanjutan profesi dan jasa yang diberikan, akuntansi profesional memikul tanggungjawab pada klien, masyarakat, kolega dan pada dirinya sendiri akan menumbuhkan sikap moral untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin (Pramono, 2007). Kesadaran auditor melakukan pekerjaan secara cermat dan teliti dapat membantu auditor dalam pengerjaan proses audit. Ketelitian dan kecermatan dalam memeriksa laporan keuangan dapat membantu auditor untuk menemukan hal-hal material dalam laporan keuangan. Temuan-temuan material yang ditemukan akan dirinci dan ditentukan batas nilai material dalam laporan keuangan. Oleh karena itu kesadaran tersebut dapat membantu auditor dalam menentukan ketepatan tingkat materialitas. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disusun hipotesis berikut:

H2: Kewajiban sosial berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Kemandirian (*autonomy demands*), yaitu suatu pandangan bahwa seorang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (Fridati, 2005; Wahyudi dan Mardiyah, 2006; Pramono, 2007; Yendrawati, 2008). Dalam pekerjaan yang terstruktur dan dikendalikan oleh manajemen secara ketat, akan sulit menciptakan tugas yang menimbulkan rasa kemandirian dalam tugas. Adanya intervensi yang datang dari luar dianggap sebagai hambatan yang dapat mengganggu otonomi profesional (Pramono, 2007). Tanpa adanya intervensi dari luar, auditor dapat lebih obyektif dan profesional dalam menentukan tingkat materialitas. Obyektifitas auditor membantu dalam memutuskan batas nilai tingkat materialitas suatu laporan keuangan. Oleh karena itu kemampuan auditor bekerja tanpa tekanan dan campur tangan dari pihak lain menentukan pertimbangan tingkat materialitas. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disusun hipotesis berikut:

H3: Kemandirian berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Keyakinan terhadap peraturan profesi (*belief in self-regulation*), yaitu suatu keyakinan bahwa yang berwenang untuk menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, dan bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka (Fridati, 2005; Wahyudi dan Mardiyah, 2006; Pramono, 2007; Yendrawati, 2008). Keyakinan tersebut akan menjadi motor bagi auditor untuk memberikan hasil pekerjaan serta pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, karena kesalahan pertimbangan yang dibuat

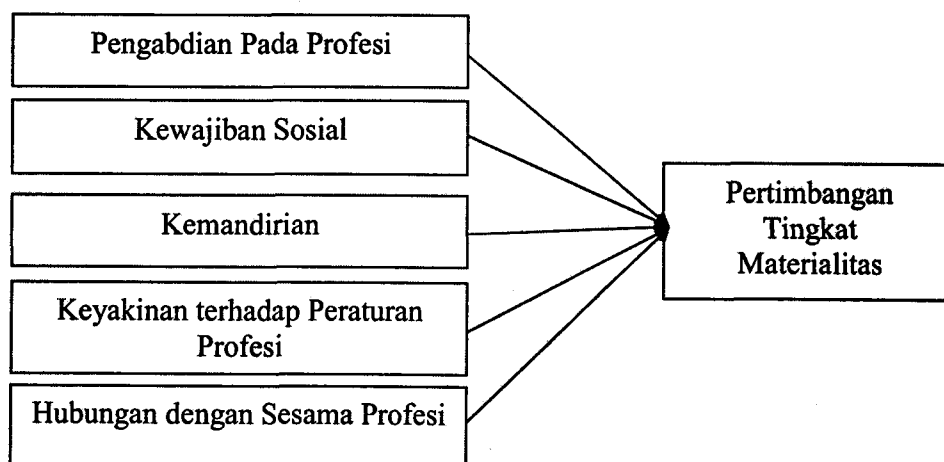
akan memberikan hasil yang berbeda (Pramono, 2007). Dengan kata lain, auditor dapat mempertanggungjawabkan keputusannya dalam menentukan hal-hal yang material. Dengan demikian, apabila ditemukan kesalahan, maka auditor harus dapat melaporkan kesalahan itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu auditor menggunakan keyakinan terhadap peraturan profesi sebagai acuan dalam mempertimbangkan tingkat materialitas. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disusun hipotesis berikut:

H4: Keyakinan terhadap peraturan profesi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Hubungan dengan sesama profesi (*professional community affiliation*), berarti menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan (Fridati, 2005; Wahyudi dan Mardiyah, 2006; Pramono, 2007; Yendrawati, 2008). Interaksi yang dilakukan dengan sesama profesi dapat menambah pengetahuan auditor dan semakin bijaksana dalam membuat perencanaan dan pertimbangan dalam proses pengauditan (Pramono, 2007). Pengetahuan yang didapat auditor membantu auditor dalam menentukan batas nilai materialitas. Sedangkan kebijaksanaan yang diperoleh membantu auditor dalam menilai dan memutuskan hal-hal yang material. Dengan demikian interaksi yang dilakukan dengan sesama profesi membantu auditor mempertimbangkan tingkat materialitas. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disusun hipotesis berikut:

H5: Hubungan dengan sesama profesi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas

Dimensi Profesionalisme



Gambar 1. Model Penelitian

Metode Penelitian

Desain Penelitian

Desain penelitian adalah kuantitatif dengan pengujian hipotesis yang bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas pada KAP di Surabaya.

Identifikasi Variabel, Definisi Operasional, dan Pengukuran Variabel

a. Variabel Independen: Profesionalisme (P), terdiri dari lima dimensi, yaitu:

1. Pengabdian Pada Profesi (PPP)
2. Kewajiban Sosial (KS)
3. Kemandirian (KM)
4. Keyakinan terhadap Peraturan Profesi (KPP)
5. Hubungan dengan Sesama Profesi (HSP)

b. Variabel Dependen: Pertimbangan Tingkat Materialitas (M)

Definisi operasional dan pengukuran variabel yang digunakan:

a. Profesionalisme (P)

Profesionalisme merupakan atribut individual yang penting tanpa melihat apakah suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak (Lekatompessy 2003; dalam Herawaty dan Susanto, 2008). Profesionalisme terdiri dari 5 dimensi, yaitu:

1. Pengabdian Pada Profesi (PPP) adalah sikap yang tercermin dalam dedikasi profesional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki, serta keteguhan untuk tetap melaksanakan profesinya meskipun imbalan ekstrinsiknya berkurang (Fridati, 2005; Wahyudi dan Mardiyah, 2006; Pramono, 2007). Dimensi PPP diukur menggunakan 8 pertanyaan (Fridati, 2005) yang dapat dilihat pada kuesioner Bagian A nomor PPP1-PPP8 (Lampiran 1).
2. Kewajiban Sosial (KS) adalah suatu pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat ataupun oleh profesional karena adanya pekerjaan tersebut (Fridati, 2005; Wahyudi dan Mardiyah, 2006; Pramono, 2007). Dimensi KS diukur menggunakan 5 pertanyaan (Fridati, 2005) yang dapat dilihat pada kuesioner Bagian A nomor KS1-KS5 (Lampiran 1).
3. Kemandirian (KM) adalah suatu pandangan bahwa seorang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (Fridati, 2005; Wahyudi dan Mardiyah, 2006; Pramono, 2007). Dimensi KM diukur menggunakan 3 pertanyaan (Fridati, 2005) yang dapat dilihat pada kuesioner Bagian A nomor KM1-KM3 (Lampiran 1).
4. Keyakinan Terhadap Peraturan Profesi (KPP) adalah suatu keyakinan bahwa yang berwenang untuk menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, dan bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka (Fridati, 2005; Wahyudi dan Mardiyah, 2006; Pramono, 2007). Dimensi KPP diukur menggunakan 3 pertanyaan (Fridati, 2005) yang dapat dilihat pada kuesioner Bagian A nomor KPPI-KPP3 (Lampiran 1).
5. Hubungan dengan sesama profesi (HSP) berarti menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan (Fridati, 2005; Wahyudi dan Mardiyah, 2006; Pramono, 2007). Dimensi HSP diukur menggunakan 5 pertanyaan (Fridati, 2005) yang dapat dilihat pada kuesioner Bagian A nomor HSP1-HSP5 (Lampiran 1).

b. Materialitas (M)

Materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut. Materialitas diukur menggunakan 18 pertanyaan (Fridati, 2005) yang dapat dilihat pada kuesioner bagian B (Lampiran 1).

Pengukuran variabel menggunakan skala *likert* untuk mengukur skor pada masing-masing butir pertanyaan pada kuesioner, dimana bagian A mengenai profesionalisme auditor yang diwakili oleh 24 butir pertanyaan dan bagian B mengenai materialitas yang diwakili oleh 18 butir pertanyaan. Penilaian skor pada bagian A dan B yang berisi pertanyaan mengenai profesionalisme auditor terhadap materialitas adalah:

1. Sangat Tidak Setuju (STS): skor 1
2. Tidak Setuju (TS) : skor 2
3. Setuju (S) : skor 3
4. Sangat Setuju (STS) : skor 4

Jenis Data dan Sumber data

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa hasil perhitungan skor masing-masing pertanyaan dalam kuesioner. Sumber data adalah data primer yang diperoleh langsung dari penyebaran kuesioner kepada akuntan publik yang bekerja pada KAP di Surabaya.

Alat dan Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data adalah kuesioner, dimana kuesioner ini diadopsi dan diadaptasi dari Fridati (2005). Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode survei, dimana kuesioner disebarkan secara langsung kepada akuntan publik yang bekerja pada KAP di Surabaya.

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian adalah akuntan yang bekerja pada KAP di kota Surabaya sebanyak 43 berdasarkan *website* Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) tahun 2011. Pengambilan sampel menggunakan metode *convenience sampling*. Responden yang menjadi target kuesioner adalah seluruh level auditor di KAP. Kuesioner disebarkan sebanyak lima kuesioner pada tiap KAP, sehingga akan disebarkan 215 kuesioner.

Teknik Analisis Data

a. Menentukan Model Statistik

$$M = a + b_1PPP + b_2KS + b_3KM + b_4KPP + b_5HSP$$

Keterangan:

M = Pertimbangan Materialitas

a = konstanta regresi

b = koefisien regresi

PPP = Pengabdian Pada Profesi

KS = Kewajiban sosial

KM = Kemandirian

KPP = Keyakinan terhadap Peraturan Profesi

HSP = Hubungan dengan Sesama Profesi

b. Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2006:49-50). Pengujian validitas dilaksanakan dengan cara melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor variabel independen. Jika hasil korelasi antara tiap-tiap pernyataan dengan skor total menunjukkan hasil yang signifikan (signifikansi $< 0,05$ dan korelasi $> 0,4$), maka item pernyataan tersebut valid.

Reliabilitas adalah suatu pengukur yang menunjukkan stabilitas dan konsistensi dari suatu instrumen yang mengukur suatu konsep dan berguna untuk mengakses "kebaikan" dari suatu pengukur (Hartono, 2007:120). Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. Jika nilai koefisien *alpha* lebih besar dari 0,60 maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian reliabel (Nunnally, 1960; dalam Ghozali, 2006:46).

c. Pengujian Asumsi Klasik, meliputi:

1. Uji Normalitas

untuk mengetahui data terdistribusi normal atau tidak. Uji mendeteksi normalitas dapat melihat grafik Normal P-P *Plot of Regression Standardized Residual*. Deteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan:

- Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Homoskedastisitas adalah semua variabel pengganggu memiliki varians yang sama (Gujarati, 2006:390). Jadi, jika variabel pengganggu memiliki varians yang berbeda antara observasi yang satu dan lainnya, maka terdapat heteroskedastisitas. Dalam mendeteksi adanya heteroskedastisitas, digunakan grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikatnya (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-*studentized*. Dasar analisisnya adalah jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolonieritas

untuk menguji korelasi antara variabel independen dalam regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Pengukuran multikolonieritas dilihat dari nilai *Tolerance*, koefisien korelasi dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Ketiga ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan variabel bebas lainnya. Nilai VIF yang semakin besar menunjukkan semakin besar multikolonieritas. Ukuran yang dipakai adalah jika $VIF > 10$ dan jika koefisien korelasi antar variabel independen $> 0,95$, serta nilai *Tolerance* $< 0,10$, maka variabel memiliki multikolonieritas yang tinggi.

4. Uji Autokorelasi

untuk mengetahui korelasi antara *time series* dan *cross section data*, walaupun autokorelasi selalu terjadi pada *time series data*. Pendeteksian autokorelasi menggunakan uji *d* dari *Durbin-Watson* dengan dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai $du < d < (4-du)$ maka tidak ada autokorelasi.

d. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi dengan uji F dan uji t:

1. Uji F, untuk menguji pengaruh secara keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F dapat dilakukan dengan *analysis of variance* (ANOVA).
2. Uji t, untuk menguji pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5%.

Hasil Penelitian

Data yang digunakan meliputi pertimbangan tingkat materialitas (M) serta profesionalisme auditor (P) yang meliputi dimensi pengabdian pada profesi (PPP), kewajiban sosial (KS), kemandirian (KM), keyakinan terhadap peraturan profesi (KPP), serta hubungan dengan sesama profesi (HSP).

Tabel 1. Deskripsi Data Penelitian

Data	Mean	Min	Max	Std Deviation
M	3,0195	2,556	3,833	0,324711
PPP	2,99062	2,125	4	0,445227
KS	3,035	2,4	4	0,386669
KM	3,25835	2,667	4	0,436804
KPP	3,21665	2,333	4	0,430645
HSP	2,975	2,4	4	0,395325

Berdasarkan Tabel 1, rata-rata jawaban dari pertimbangan tingkat materialitas (M) adalah 3,0195 dengan penyimpangan sebesar 0,324711. Item pertanyaan M2 mendapat rata-rata tertinggi yang menunjukkan bahwa materialitas berhubungan dengan karakteristik suatu *statement*, fakta, item yang diungkapkan atau metode berekspresi yang berpengaruh pada *judgment* seorang auditor.

Rata-rata jawaban dari pengabdian pada profesi (PPP) adalah 2,99062 dengan penyimpangan sebesar 0,445227. Item pertanyaan PPP1 mendapat rata-

rata tertinggi yang menunjukkan bahwa auditor menggunakan segenap pengetahuan, kemampuan, dan pengalamannya dalam melaksanakan proses pengauditan.

Rata-rata jawaban dari kewajiban sosial (KS) adalah 3,035 dengan penyimpangan sebesar 0.386669. Item pertanyaan KS1 mendapat rata-rata tertinggi yang menunjukkan bahwa auditor menyadari bahwa profesi eksternal auditor merupakan profesi yang penting di masyarakat.

Rata-rata jawaban dari kemandirian (KM) adalah 3,25835 dengan penyimpangan sebesar 0.436804. Item pertanyaan KM1 mendapat rata-rata tertinggi yang menunjukkan bahwa auditor dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan tidak berada dibawah tekanan dari siapapun.

Rata-rata jawaban dari keyakinan terhadap peraturan profesi (KPP) adalah 3,21665 dengan penyimpangan sebesar 0.430645. Item pertanyaan KPP3 mendapat rata-rata tertinggi yang menunjukkan bahwa auditor mempunyai rasa ikut memiliki organisasi dimana mereka bekerja.

Rata-rata jawaban dari hubungan dengan sesama profesi (HSP) adalah 2,975 dengan penyimpangan sebesar 0,395325. Item pertanyaan HSP5 mendapat rata-rata tertinggi yang menunjukkan bahwa auditor akan menarik diri dari tugas, jika masyarakat atau orang memandang auditor tersebut tidak independen terhadap suatu penugasan.

Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Dari hasil pengujian, PPP1-PPP8 mempunyai nilai signifikansi di bawah 0,05 dan korelasi di atas 0,4 sehingga delapan instrumen valid untuk mengukur variabel pengabdian pada profesi.

KS1-KS5 mempunyai nilai signifikansi di bawah 0,05 dan korelasi di atas 0,4 sehingga lima instrumen valid untuk mengukur variabel kewajiban sosial.

KM1-KM3 mempunyai nilai signifikansi di bawah 0,05 dan korelasi di atas 0,4 sehingga tiga instrumen valid untuk mengukur variabel kemandirian.

KPP1-KPP3 mempunyai nilai signifikansi di bawah 0,05 dan korelasi di atas 0,4 sehingga tiga instrumen valid untuk mengukur variabel keyakinan terhadap peraturan profesi.

HSP1-HSP5 mempunyai nilai signifikansi di bawah 0,05 dan korelasi di atas 0,4 sehingga lima instrumen valid untuk mengukur variabel hubungan dengan sesama profesi.

M1-M18 mempunyai nilai signifikansi di bawah 0,05 dan korelasi di atas 0,4 sehingga delapan belas instrumen yang valid untuk mengukur variabel pertimbangan tingkat materialitas

b. Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas, diketahui nilai *alpha* menunjukkan koefisien reliabilitas untuk variabel pengabdian pada profesi sebesar 0,835, kewajiban sosial sebesar 0,677, kemandirian sebesar 0,853, keyakinan terhadap peraturan profesi sebesar 0,667, hubungan dengan sesama profesi sebesar 0,673 dan pertimbangan tingkat materialitas sebesar 0,893, maka dapat disimpulkan

bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini reliabel sehingga layak untuk menguji hipotesis.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Dari hasil uji normalitas, titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil pengujian Heteroskedastisitas yang dilihat dari penyebaran residual hasil estimasi model yang dipaparkan dengan grafik *Scatterplot*, penyebarannya acak atau tidak membentuk pola, serta penyebarannya berada di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat dikatakan semua variabel penelitian terbebas dari Heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolonieritas

Hasil uji Multikolonieritas untuk nilai *Tolerance* dan VIF, diketahui bahwa dimensi pengabdian pada profesi memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,292 dan nilai VIF sebesar 3,428, dimensi kewajiban sosial memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,601 dan nilai VIF sebesar 1,664, dimensi kemandirian memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,451 dan nilai VIF sebesar 2,218, dimensi keyakinan terhadap peraturan profesi memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,535 dan nilai VIF sebesar 1,870, dan dimensi hubungan dengan sesama profesi memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,426 dan nilai VIF sebesar 2,349. Selain itu hasil uji Multikolonieritas untuk nilai koefisien korelasi, dimana tidak terdapat koefisien korelasi antar variabel independen $> 0,95$. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonieritas pada tiap variabel independen.

d. Uji Autokorelasi

Nilai *Durbin-Watson* yang didapat sebesar 1,878. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai du sebesar 1,786 dengan kriteria nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 40, dan jumlah variabel independen 5. Oleh karena nilai *Durbin-Watson* lebih besar dari batas atas (du) 1,786 dan kurang dari $4 - 1,786$ (4-du), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Pengujian Hipotesis

a. Uji F

Tabel 2. Uji F
ANOVA^b

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.670	5	.534	12.597	.000 ^a
	Residual	1.442	34	.042		
	Total	4.112	39			

Dari Tabel 2, diketahui tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan dimensi pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap peraturan profesi, dan hubungan dengan sesama profesi secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

b. Uji t

Tabel 3. Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.007	.325		3.103	.004
PPP	.391	.137	.536	2.849	.007
KS	.287	.110	.342	2.611	.013
KM	.144	.112	.194	1.283	.208
KPP	.036	.105	.048	.345	.732
HSP	-.206	.128	-.251	-1.614	.116

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$M = 18,389 + 0,859PPP + 1,041KS + 0,861KM + 0,165KPP - 0,701HSP$$

Konstanta sebesar 18,389 menyatakan bahwa jika tidak memperhitungkan dimensi pengabdian pada profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap peraturan profesi, dan hubungan dengan sesama profesi maka kemungkinan pertimbangan tingkat materialitas adalah sebesar 18,389.

Hasil uji statistik t pada dimensi pengabdian pada profesi menunjukkan tingkat signifikansi $0,007 < 0,05$ yang berarti H1 diterima. Koefisien regresi variabel pengabdian pada profesi memiliki konstanta 0,391 yang berarti dimensi pengabdian pada profesi mempunyai pengaruh positif atau arahnya searah dengan pertimbangan tingkat materialitas. Dengan demikian pengabdian pada profesi berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Dimensi kewajiban sosial menunjukkan tingkat signifikansi $0,013 < 0,05$ yang berarti H2 diterima. Koefisien regresi dimensi kewajiban sosial memiliki konstanta 0,287 yang berarti dimensi kewajiban sosial mempunyai pengaruh positif atau arahnya searah dengan pertimbangan tingkat materialitas. Dengan demikian kewajiban sosial berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Dimensi kemandirian menunjukkan tingkat signifikansi $0,208 > 0,05$ yang berarti H3 ditolak. Koefisien regresi dimensi kemandirian memiliki konstanta 0,144 yang berarti dimensi kemandirian mempunyai pengaruh positif atau arahnya searah dengan pertimbangan tingkat materialitas. Dengan

demikian dimensi kemandirian tidak berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Dimensi keyakinan terhadap peraturan profesi menunjukkan tingkat signifikansi $0,732 > 0,05$ yang H_4 ditolak. Koefisien regresi dimensi keyakinan terhadap peraturan profesi memiliki konstanta 0,036 yang berarti dimensi keyakinan terhadap peraturan profesi mempunyai pengaruh positif atau arahnya searah dengan pertimbangan tingkat materialitas. Dengan demikian keyakinan terhadap peraturan profesi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Dimensi hubungan dengan sesama profesi menunjukkan tingkat signifikansi $0,116 > 0,05$ yang berarti H_5 ditolak. Koefisien regresi dimensi hubungan dengan sesama profesi memiliki konstanta -0,206 yang berarti dimensi keyakinan terhadap peraturan profesi mempunyai pengaruh negatif atau arahnya berlawanan dengan pertimbangan tingkat materialitas. Dengan demikian hubungan dengan sesama profesi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengabdian Pada Profesi terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas

Hipotesis dari variabel pengabdian pada profesi menyatakan bahwa pengaruh pengabdian pada profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dan hasil regresi linier berganda tingkat signifikansi 0,007 yang berarti pengabdian pada profesi berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Pada uji statistik t, koefisien regresi variabel pengabdian pada profesi memiliki konstanta 0,391 yang berarti variabel pengabdian pada profesi mempunyai pengaruh positif atau arahnya searah dengan pertimbangan tingkat materialitas. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengabdian pada profesi maka semakin besar munculnya keputusan terhadap pertimbangan tingkat materialitas atau sebaliknya. Menurut Pramono (2007), pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Berdasarkan hal tersebut auditor akan lebih berhati-hati bijaksana dalam menentukan tingkat materialitas. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Fridati (2005), Wahyudi dan Mardiyah (2006), dan Pramono (2007) yang menyatakan bahwa auditor dengan dedikasi yang tinggi akan tetap melaksanakan pekerjaannya walaupun imbalan berkurang dan mampu melakukan pertimbangan dengan baik karena memiliki komitmen yang kuat terhadap pekerjaannya.

2. Pengaruh Kewajiban Sosial terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas

Hipotesis dari variabel kewajiban sosial menyatakan bahwa pengaruh kewajiban sosial berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dan hasil regresi linier berganda menunjukkan tingkat signifikansi 0,013 yang

berarti kewajiban sosial berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Pada uji statistik t, koefisien regresi variabel kewajiban sosial memiliki konstanta 0,287 yang berarti variabel kewajiban sosial mempunyai pengaruh positif atau arahnya searah dengan pertimbangan tingkat materialitas. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kewajiban sosial maka semakin besar munculnya keputusan terhadap pertimbangan tingkat materialitas atau sebaliknya. Menurut Fridati (2005), kewajiban sosial adalah suatu pandangan tentang pentingnya peranan profesi serta manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Kesadaran auditor tentang peran profesinya di masyarakat akan membuat auditor melakukan pekerjaan secara cermat dan teliti untuk dapat membantu auditor dalam memeriksa laporan keuangan. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Fridati (2005) dan Pramono (2007) yang menyatakan bahwa ketelitian dan kecermatan auditor dapat membantu auditor menemukan hal-hal material dalam laporan keuangan, sehingga auditor akan mempertimbangkan tingkat materialitas pada suatu laporan keuangan.

3. Pengaruh Kemandirian terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas

Hipotesis dari variabel kemandirian menyatakan bahwa pengaruh kemandirian berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas, sedangkan hasil regresi linier berganda menunjukkan tingkat signifikansi 0,208 yang berarti kemandirian tidak berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Yendrawati (2008) yang menyatakan bahwa kemandirian tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Namun penelitian ini berbeda dengan Fridati (2005), Wahyudi dan Mardiyah (2006), dan Pramono (2007) yang menyatakan bahwa kemandirian berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Penolakan hipotesis ini dikarenakan 67,5% responden berkedudukan sebagai auditor junior dan hanya terdapat 22,5% responden yang bekerja di atas 3 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih merupakan auditor junior dan belum mempunyai pengalaman yang cukup di bidang auditor eksternal. Menurut Yendrawati (2008), auditor yang mengalami tekanan dan campur tangan oleh berbagai pihak luar akan menyebabkan auditor tidak dapat memberikan pertimbangan terhadap materialitas secara objektif. Oleh karena itu, kemandirian yang merupakan sikap mental auditor dalam merencanakan, melaksanakan pemeriksaan dan menyatakan pendapat atas laporan keuangan tidak dapat menentukan tingkat materialitas. Selain itu, setiap auditor dalam melaksanakan pekerjaan selalu harus berpedoman pada standar auditing sehingga kebebasan untuk mandiri setiap auditor terbatas dan harus bekerja dengan cermat dalam menentukan tingkat materialitas.

4. Pengaruh Keyakinan terhadap Peraturan Profesi terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas

Hipotesis dari variabel keyakinan terhadap peraturan profesi menyatakan bahwa pengaruh keyakinan terhadap peraturan profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas, sedangkan hasil regresi linier berganda

menunjukkan tingkat signifikansi 0,732 yang berarti keyakinan terhadap peraturan profesi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Hasil ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Fridati (2005), Wahyudi dan Mardiyah (2006), Pramono (2007), dan Yendrawati (2008) yang menyatakan bahwa keyakinan terhadap peraturan profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Menurut Yendrawati (2008), keyakinan terhadap peraturan profesi merupakan bentuk kepercayaan auditor terhadap kompetensi profesi auditor, bahwa yang berhak untuk menilai pekerjaan professional adalah rekan seprofesi yang memiliki kompetensi dan pengetahuan di bidang ilmu dan pengetahuan mereka. Penolakan hipotesis ini dikarenakan 67,5% responden berkedudukan sebagai auditor junior, dimana hanya 22,5% responden yang mempunyai pengalaman bekerja selama 3 tahun ke atas dan sebanyak 90% responden mempunyai latar belakang pendidikan S1. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih merupakan auditor junior yang belum mempunyai pengalaman bekerja yang cukup dan belum mempunyai pengetahuan yang cukup di bidang eksternal auditor. Hal tersebut mengakibatkan auditor tidak memiliki keyakinan terhadap peraturan profesi sebagai pedoman dalam menentukan pertimbangan tingkat materialitas yang tepat.

5. Pengaruh Hubungan dengan sesama profesi terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas

Hipotesis dari variabel hubungan dengan sesama profesi menyatakan bahwa pengaruh hubungan dengan sesama profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas, sedangkan hasil regresi linier berganda menunjukkan tingkat signifikansi 0,116 yang berarti hubungan dengan sesama profesi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Penelitian ini berbeda dengan Fridati (2005), Wahyudi dan Mardiyah (2006), dan Pramono (2007) yang menyatakan bahwa hubungan dengan sesama profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Penolakan hipotesis ini dikarenakan oada uji statistik t, koefisien regresi variabel pengabdian pada profesi menunjukkan angka -0,206 yang berarti variabel hubungan dengan sesama profesi mempunyai pengaruh negatif atau arahnya berlawanan dengan pertimbangan tingkat materialitas. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan tingkat materialitas akan semakin menurun seiring dengan meningkatnya variabel hubungan dengan sesama profesi. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Yendrawati (2008) yang menyatakan bahwa semakin tinggi frekuensi auditor ikut berpartisipasi dan berinteraksi dengan sesama profesi dalam kegiatan yang diadakan oleh organisasi profesi tetap tidak menentukan pertimbangan tingkat materialitas. Jadi semakin tinggi hubungan dengan sesama profesi tidak menentukan semakin tepat dalam menentukan tingkat materialitas.

Simpulan dan Saran

Hasil analisis menunjukkan bahwa profesionalisme auditor berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Dari lima dimensi profesionalisme,

dimensi pengabdian pada profesi dan kewajiban sosial berpengaruh terhadap tingkat materialitas. Dimensi pengabdian pada profesi berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas sehingga semakin tinggi pengabdian pada profesi maka semakin besar munculnya keputusan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Dimensi kewajiban sosial berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas sehingga semakin tinggi kewajiban sosial maka semakin besar munculnya keputusan terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Tiga dimensi lainnya yaitu kemandirian, keyakinan terhadap peraturan profesi, dan hubungan dengan sesama profesi tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Kemandirian tidak mempengaruhi dikarenakan sebagian besar responden merupakan auditor junior dan belum mempunyai pengalaman bekerja yang cukup lama, sehingga auditor mengalami tekanan dan campur tangan oleh berbagai pihak luar yang menyebabkan auditor tidak dapat memberikan pertimbangan terhadap materialitas secara objektif. Keyakinan terhadap peraturan profesi tidak mempengaruhi dikarenakan sebagian besar responden masih merupakan auditor junior yang belum mempunyai pengalaman bekerja yang cukup dan belum mempunyai pengetahuan yang cukup di bidang eksternal auditor, sedangkan hubungan dengan sesama profesi tidak mempengaruhi dikarenakan koefisien regresi variabel pengabdian pada profesi menunjukkan angka negatif yang berarti variabel hubungan dengan sesama profesi mempunyai pengaruh negatif atau arahnya berlawanan dengan pertimbangan tingkat materialitas.

Berdasarkan simpulan penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Auditor independen selayaknya memperhatikan kompetensi yang dimilikinya karena hasil penelitian menyatakan bahwa dimensi pengabdian pada profesi berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Peningkatan kompetensi auditor diperlukan adanya pemberian pelatihan-pelatihan serta diberikan kesempatan kepada para auditor untuk mengikuti kursus-kursus atau peningkatan pendidikan profesi.
2. Auditor hendaknya memiliki sikap moral yang tinggi dalam bertanggung jawab kepada klien, masyarakat, dan koleganya. Dengan sikap moral yang tinggi, auditor akan mampu melakukan pekerjaannya dengan baik.
3. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya dapat mempertimbangkan untuk penambahan variabel lainnya selain profesionalisme, yang berkaitan dengan variabel pertimbangan tingkat materialitas, agar dapat diketahui seberapa besar pengaruhnya terhadap pertimbangan tingkat materialitas auditor. Selain itu dalam pemilihan sampel penelitian dapat memperhatikan proporsi tingkatan auditor yang ada (auditor junior, auditor senior, dan lainnya)

Daftar Rujukan

- Arens, A. A., Randal J. E., dan Mark S. B., 2008, *Auditing dan Jasa Assurance*. Edisi 12, Jilid 1. Terjemahan oleh Herman Wibowo. Jakarta: Erlangga.
- Auditor Empat Besar, 2008, (http://id.wikipedia.org/wiki/Auditor_Empat_Besar, diunduh 20 Maret 2011).

- Boynton, W.C., N. J. Raymond dan G. K. Walter. 2002. *Modern Auditing*. Edisi 7, Jilid 1. Terjemahan oleh Paul A. Rajoe, dkk. Jakarta: Erlangga.
- Fridati, W. 2005. "Analisis Hubungan Antara Profesionalisme Auditor dengan Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan di Jogjakarta". Skripsi Sarjana tidak dipublikasikan. Universitas Islam Indonesia.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. 2006. *Essentials of Econometrics*. Edisi Ketiga. Singapore: McGraw-Hill Education.
- Hartono, J. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Herawaty, A. dan K.S. Yulius. 2008. "Profesionalisme, Pengetahuan Akuntan Publik dalam Mendeteksi Kekeliruan, Etika Profesi dan Pertimbangan Tingkat Materialitas". Makalah disampaikan pada *The 2nd National Conference*. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. 2010. *Kode Etik Profesi Akuntan Publik*, Jakarta.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). 2011. (Online). (<http://www.iapi.or.id/iapi/download/Directori2011/Surabaya.pdf>, diunduh 26 Februari 2011).
- Martiyani, M. 2010. "Pengaruh Profesionalisme Auditor dan Kualitas Audit Terhadap Tingkat Materialitas dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan". Skripsi Sarjana tidak dipublikasikan. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran".
- Pramono, R. 2007. "Pengaruh Dimensi Profesionalisme Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan". Skripsi Sarjana tidak dipublikasikan. Universitas Negeri Semarang.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. (Online). (<http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>, diunduh 20 Maret 2011)
- Santoso, S. 2010. *Mastering SPSS 18*. Jakarta: PT Gramedia.
- Simamora, H. 2002. *Auditing*. Jilid 1. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Wahyudi, H. dan A. M. Aida. 2006. "Pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Tingkat Materialitas dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan". Makalah disampaikan pada Simposium Akuntansi Nasional IX Padang.
- Yendrawati, R. 2008. "Analisis Hubungan antara Profesionalisme Auditor dengan Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan". *Jurnal Penelitian dan Pengabdian*. 6 (1): hal. 75-86.

Lampiran 1. Kuesioner

Data Responden

Petunjuk: Centanglah (√) pada Kolom yang ingin diisi

Tanggal pengisian :

Nama KAP :

Nama responden (dapat tidak diisi) :

Jenis kelamin : (L / P) Usia : (... tahun)

Lama bekerja di Kantor Akuntan Publik:

() kurang dari 1 tahun () 1-3 tahun

() 3-5 tahun ke atas () 5 tahun keatas

Kedudukan dalam Kantor Akuntan Publik:

() Karyawan Magang () Manajer

() Auditor Senior () Auditor Junior

() Supervisor () Partner

Latar belakang pendidikan akuntansi:

() D3 () S1 () S2

() S3 Lain-lain:

Pelatihan-pelatihan terkait dengan profesi yang pernah diperoleh:

.....

Isian Kuisisioner

Petunjuk pengisian : Berilah tanda **check** (√) pada kolom yang telah disediakan dengan kriteria jawaban sebagai berikut:

STS = Sangat tidak setuju

TS = Tidak setuju

S = Setuju

S = Sangat setuju

Bagian A

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
PPP1	Saya menggunakan segenap pengetahuan, kemampuan dan pengalaman saya dalam melaksanakan proses pengauditan.				
PPP2	Saya akan tetap teguh pada profesi sebagai auditor meskipun saya mendapatkan tawaran pekerjaan lain dengan imbalan yang lebih besar.				
PPP3	Saya mendapatkan kepuasan batin dengan berprofesi sebagai auditor.				
PPP4	Pekerjaan sebagai auditor sudah menjadi cita-cita saya sejak dulu sampai nanti.				
PPP5	Saya mau bekerja di atas batas normal untuk membantu KAP dimana saya bekerja agar saya sukses.				
PPP6	Saya merasa terlalu riskan untuk meninggalkan pekerjaan saya sekarang ini.				
PPP7	Saya berlangganan dan membaca secara rutin majalah dan jurnal tentang eksternal audit dan publikasi profesi lainnya.				
PPP8	Saya ikut terlibat secara emosional terhadap KAP dimana saya bekerja.				
KS1	Profesi eksternal auditor adalah profesi yang penting di masyarakat.				

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
KS2	Profesi eksternal auditor mampu menjaga kekayaan negara atau masyarakat.				
KS3	Profesi eksternal auditor merupakan profesi yang dapat dijadikan dasar kepercayaan masyarakat terhadap pengelola kekayaan Negara.				
KS4	Profesi eksternal auditor merupakan satu-satunya profesi yang menciptakan transparansi dalam masyarakat.				
KS5	Jika ada kelemahan dalam independensi eksternal auditor akan merugikan masyarakat.				
KM1	Saya merencanakan dan memutuskan hasil audit saya berdasarkan fakta yang saya temui dalam proses pemeriksaan.				
KM2	Dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan saya tidak berada di bawah tekanan manajemen.				
KM3	Dalam menentukan pendapat atas laporan keuangan saya tidak mendapatkan tekanan dari siapapun.				
KPP1	Pemeriksaan atas laporan keuangan untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan hanya dapat dilakukan oleh eksternal auditor.				
KPP2	Eksternal auditor mempunyai cara yang dapat diandalkan untuk menilai kompetensi eksternal auditor lain.				
KPP3	Ikatan eksternal auditor harus mempunyai cara dan kekuatan untuk pelaksanaan standar untuk eksternal auditor.				
HSP1	Saya ikut memiliki organisasi dimana saya bekerja.				
HSP2	Saya selalu berpartisipasi dalam pertemuan para eksternal auditor.				
HSP3	Saya sering mengajak rekan-rekan seprofesi untuk bertukar pendapat tentang masalah yang ada baik dalam satu organisasi maupun organisasi lain.				
HSP4	Saya mendukung adanya organisasi ikatan eksternal auditor.				
HSP5	Jika masyarakat atau orang memandang saya tidak independen terhadap suatu penugasan, saya akan menarik diri dari penugasan tersebut.				

Bagian B

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
M1	Materialitas adalah suatu konsep yang vital dalam proses pengauditan.				
M2	Materialitas berhubungan dengan karakteristik suatu statement, fakta, item yang diungkapkan atau metode berekspresi yang berpengaruh				

PENGARUH PROFESIONALISME AUDITOR TERHADAP PERTIMBANGAN TINGKAT MATERIALITAS PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI SURABAYA OLEH: SOFIAN DAN LINDRAWATI

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
	pada judgment seorang auditor.				
M3	Saya merasa kesulitan dalam menentukan tingkat materialitas suatu transaksi.				
M4	Dalam menyusun rencana audit saya akan mempertimbangkan resiko yang akan ditemui selama proses audit.				
M5	Saya akan selalu membuat perencanaan audit yang matang.				
M6	Materialitas menurut saya bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan				
M7	Materialitas merupakan pendapat subjektif masing-masing auditor.				
M8	Materialitas suatu rekening akuntansi salah saji menjadi faktor pertimbangan utama dalam menentukan kewajaran laporan keuangan.				
M9	Dalam menentukan suatu transaksi itu material atau tidak saya menggunakan dasar pengalaman dalam proses audit.				
M10	Dalam menentukan ketepatan tingkat materialitas saya menggunakan dasar pengetahuan dan kecakapan dalam melaksanakan pekerjaan audit.				
M11	Dalam menentukan suatu transaksi atau saldo itu material saya sering menggunakan dasar sesuai petunjuk manajemen.				
M12	Ketepatan dalam menentukan tingkat materialitas tidak dapat ditentukan oleh professional atau tidaknya eksternal auditor.				
M13	Ketepatan dalam menentukan tingkat materialitas ditentukan oleh kemampuan auditor membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain.				
M14	Ketepatan dalam menentukan tingkat materialitas tidak ditentukan oleh sikap yang dimiliki oleh auditor sehubungan dengan imbalan yang diperoleh dalam memeriksa laporan keuangan.				
M15	Ketepatan dalam menentukan tingkat materialitas ditentukan oleh komitmen auditor terhadap pekerjaannya.				
M16	Ketepatan dalam menentukan tingkat materialitas ditentukan oleh tingkat kesadaran auditor terhadap pentingnya peranan dan manfaat profesi auditor bagi masyarakat.				
M17	Ketepatan dalam menentukan tingkat materialitas ditentukan oleh tingkat kepercayaan auditor terhadap peraturan profesi.				
M18	Ketepatan dalam menentukan tingkat materialitas ditentukan oleh baik tidaknya hubungan auditor terhadap sesama profesi.				